

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan adanya Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan untuk memberikan kemudahan berupa dikeluarkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Edaran Nomor 3/SE-100.TU.03/III/2020 tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen melaksanakan sesuai surat edaran tersebut dengan melakukan pelayanan dengan *online* seluruhnya dan hanya mengambil produk pertanahan yang sudah jadi dapat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen secara langsung.

2. Kendala-kendala atau permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan pelayanan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen disebutkan sebagai berikut :

- a. Kurang memudahinya sarana tentang informasi pelayanan pendaftaran tanah secara online yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan peralihan hak milik atas tanahnya karena jual beli oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.
- b. Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam memberikan informasi tentang mekanisme pendaftaran secara online kepada masyarakat menjadi salah satu kendala pula, dimana pihak kantor pertanahan kabupaten sragen kurang dalam mengoptimalkan media sosial maupun web internet yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen untuk memberikan informasi mengenai pendaftaran secara online yang lebih memadahi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti

pengembangan website dan media informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, dengan memberikan informasi lebih tentang mekanisme pendaftaran online.

2. Perlunya pembenahan mengenai penyuluhan yang dilakukan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen mengenai mekanisme pendaftaran secara online dengan menggunakan atau mengoptimalkan media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen serta website yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi Rianto, 2015, *Aspek Hukum dan Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Arba H.M., 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewi I Gusti Ayu Gangga Santi, 2019, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Hanafi, 2016, *Hukum Agraria Diktat Hukum Agraria*, Duta Media Publishing, Pamekasan.
- Harsono Boedi, 2008, *Hukum Agraria Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Hartanto J. Andy, 2018, *Aspek Hukum Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Jakad Publishing, Surabaya.
- Iskandar Syah Mudakir, 2019, *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Laksmo Utomo St., 2020, *Buku Ajar Hukum Agraria Dan Property. Lembaga Studi Hukum Indonesia*, Jakarta.
- M. Hadiwiyono Suharyono, 2020, *Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Inteligensia Media, Malang.
- Purnamasari Irma Devita, 2010, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Kaira, Jakarta.
- Santoso Urip, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Santoso Urip, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Santoso Urip, 2017, *Pejabat Pembuat Akta Tanah : Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Kencana, Jakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan; Agraria; Dan Tata Ruang*, Kencana,
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 88.1/SKHR.01/IV/2020 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Hak Atas Tanah Dan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian, Perpanjangan Atau Pembaruan Hak Atas Tanah Yang Telah Atau Akan Berakhir Pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2/SE100.TU.03/III/2020 Tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 7/SE100.HR.01/IV/2020 Tentang Kemudahan Pelayanan Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran Nomor 1/SE-100.HR.01.01/11/2021 Tentang Kemudahan Pelayanan Penetapan Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.

Jurnal

Adi Sudiro, A. & Prawira Putra, A, 2020, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan”, Vol. 5, 3-10.

Agrisal Rusian, R. & Ma'ruf, U, 2017. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta PPAT Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara”, Vol. 4, 4-7.

Juosfiel Sadpri Pansariang, 2014, “Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia”, Vol. 2, 7-10.

Ulum, R. A. N. Silviana, Ana. Ispriyarso, Budi, 2021, “Pelayanan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Di Masa Pandemi COVID-19”, Vol. 14, 9-14.

Karya Ilmiah

- Al Farisi, Salman. 2020. Proses Pendaftaran Pemberian Hak Milik Atas Tanah Yang dikuasai Negara Pada Kantor ATR/BPN KABUPATEN PEMALANG. Skripsi. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Meiyani, Erfa. 2009. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli Di Kantor Kabupaten Kudus. Skripsi Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Mohammad Faisal Shofa, Aulia. 2016. Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Skripsi Jember: Universitas Jember.
- Rani Damanik, Maria. 2021. Akibat Pandemi Coronavirus-2019 Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan. Skripsi Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sari Aritonang, Nopika. 2018. Efektivitas Pengurusan Pertanahan Berbasis Online Dalam Membantu Kinerja PPAT Melakukan Tugas Jabatannya. Skripsi Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Silvana, Anggi. 2021. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dimasa COVID-19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Skripsi Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Syafitri, Ellana Nur. 2018. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Tegal. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Internet/Web Site

- Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 3/SE-100.TU.03/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat_edaran_menteri_agraria_dan_tata_ruang_badan_pertanahan_nasional_nomor_3_se_100_tu_03_iii_2020_tahun_2020-2.pdf, (Diakses 10 September 2021, 13.00 WIB)
- Surat Edaran Nomor 2/SE-100.TU.03/III/2020 Tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian ATR/BPN
https://covid19.atrbpn.go.id/unduh/SE_2%20tentang%20Pencegahan%20Penyebaran%20COVID%2019.pdf, (Diakses 10 September 2021, 15.00 WIB)
- Pelayanan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Masa Pandemi
<https://hukumproperti.com/pelayanan-dan-pendaftaran-hak-atas-tanah-pada-masa-pandemi-covid-19/>, (Diakses 11 September 2021, 10.30 WIB).

Pendaftaran Hak Atas Tanah di Masa COVID-19
<https://mediaindonesia.com/opini/330118/pendaftaran-hak-atas-tanah-di-masa-covid-19>, (Diakses 11 September 2021, 11.15 WIB).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/PP%20No.%2024%20Th%201997%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/PP%20No.%2024%20Th%201997%20(1).pdf), (Diakses 12 September 2021, 08.00 WIB)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia

<https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960-1.pdf>, (Diakses 12 September 2021, 09.00)

Pengertian Jual Beli menurut KBBI

<https://kbbi.web.id/jual%20beli>, (Diakses 12 September 2021, 11.00 WIB)

Profil Wilayah Sragen

http://tataruang.pusdataru.jatengprov.go.id/profil/detail_profil_kab_kota/314, (Diakses 10 Oktober 2021, 23.00 WIB)